

PENENTUAN STATUS PENGUNGSI BAGI IMIGRAN YANG BERADA DI INDONESIA

Verent Austin Lie

Jurusan/Program studi: Hukum, Ilmu Hukum

Pembimbing 1: Dr. Wisnu Aryo Dewato, S.H., LL.M., LL.M.,

2: Suhariwanto, S.H., M.Hum.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi tentang Imigran dan Pengungsi dari Luar Negeri yang berada di Indonesia, penelitian ini didasarkan dari informasi yang di dapatkan langsung dari rumah detensi Surabaya. Penelitian ini juga menganalisis peran dari UNCHR dalam menangani pencari suaka, khususnya mengenai penentuan status pengungsi yang berada di Indonesia. Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, telah memberikan pedoman bagi Indonesia untuk menangani keberadaan pencari suaka dan pengungsi. Imigran yang masuk ke wilayah Indonesia kemungkinan menimbulkan masalah sehingga diperlukan aturan yang menangani itu. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder, Data primer berasal dari penelitian lapangan, data tersebut didapatkan melalui wawancara yang didasarkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang telah terstruktur. Data primer didapatkan melalui studi perpustakaan dan data yang didapatkan secara online. Data yang didapatkan telah dipilih dan telah dianalisa. Walaupun, implementasi perpres tersebut masih ditemukan sejumlah tantangan dan hambatan kurang sosialisasi kepada lembaga yang berkaitan terkait Perpres tersebut, belum adanya satgas penanganan pengungsi dari luar negeri; keterbatasan SDM dan anggaran; tidak tersedianya lahan penampungan bagi pengungsi dan lain-lain.

Kata kunci : Pengungsi, IOM dan UNCHR, Imigran, Penentuan Status Pengungsi, Pengungsi Surabaya

REFUGEE STATUS DETERMINATION FOR IMIGRAN IN INDONESIA

Verent Austin Lie

Departement/Study Program: Law/ Legal Studies

Advisor 1: Dr. Wisnu Aryo Dewato, S.H., LL.M., LL.M.,

2: Suhariwanto, S.H., M.Hum.

Abstract

This research is aimed to collect more information about Imigran and International Refugees in Indonesia, this study based on information that obtained by Surabaya house of detention. This study analyzes the role of High Commissioner for Refugees in dealing with asylum seekers, specially about refugee status determination in Indonesia. The issuance of Presidential Regulation No. 125 of 2016, has provided guidelines for Indonesia to deal with the existence of asylum seekers and refugees. Refugees who enter the territory of Indonesia are likely to cause problems so that rules are needed to deal with it. The data used in this study are primary and secondary data. Primary data obtained from field research and data collection were conducted using interviews based on structured questions. Secondary data is obtained through library research, and online computer search. The data obtained are then selected and then analysed. However the implementation of Presidential Regulation, there are still a number of challenges and obstacles found including: lack of dissemination to the institute that related to each other regarding the Presidential Regulation; there is no task force for handling refugees and illegal immigrants from abroad; limited human resources and budget; unavailability of shelter land for refugees.

Keywords: *Refugees, IOM and UNHCR, Immigrant, Refugee Status Determination, Surabayan Refugees*